

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693102/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Provinsi : (12) LAMPUNG
- 4. Kode>Nama Satker : (693102) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
- Sebesar : Rp. 2.431.412.000 (DUA MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.431.412.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN BANDAR LAMPUNG (017) Rp. 2.431.412.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

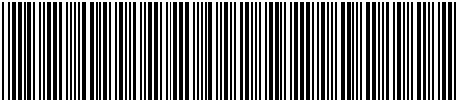
ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693102/2025

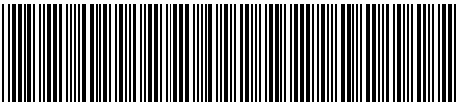


DS:1368-2132-0778-0090

Satker : (693102) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	134.288.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	134.288.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.297.124.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	2.297.124.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693102/2025
I A. INFORMASI KINERJA



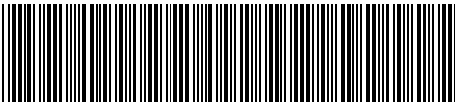
DS:1368-2132-0778-0090

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (693102) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi			134.288.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah			134.288.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan			
		2. 02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	13.920.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	13.920.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	120.368.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	120.368.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.297.124.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			2.297.124.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah			
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi			
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah			
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10,00	Lembaga	95.699.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	10,00	Lembaga	95.699.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	17,00	Kelompok Masyarakat	174.375.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	66.925.000
		02 BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	15,00	Kelompok Masyarakat	107.450.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693102/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1368-2132-0778-0090

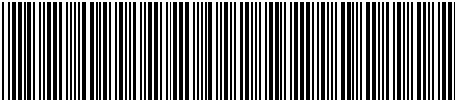
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (693102) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat					Kelompok Masyarakat		
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	1,00	Orang	24.291.000
Rincian Output		:	01 BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah	1.00	Orang	24.291.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	22,00	Lembaga	73.983.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	22.00	Lembaga	73.983.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	22.816.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	1.00	dokumen	22.816.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	4.550.000
Rincian Output		:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	1.00	Laporan	4.550.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	207,00	Orang	1.656.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	207.00	Orang	1.656.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	23,00	Kelompok Masyarakat	245.410.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	23.00	Kelompok Masyarakat	245.410.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693102/2025
I B. SUMBER DANA



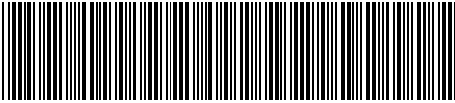
DS:1368-2132-0778-0090

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (693102) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.431.412.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	2.431.412.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
(dalam ribuan rupiah)								

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693102/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



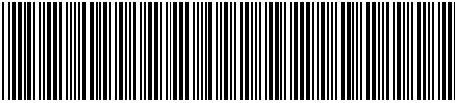
DS:1368-2132-0778-0090

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (693102) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693102	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG	-	2.421.412	10.000	-	-	2.431.412	12 . 00	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	134.288	-	-	-	134.288		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	134.288	-	-	-	134.288		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	13.920	-	-	-	13.920		
01	RM	-	13.920	-	-	-	13.920		
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	120.368	-	-	-	120.368		
01	RM	-	120.368	-	-	-	120.368		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.287.124	10.000	-	-	2.297.124		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	2.287.124	10.000	-	-	2.297.124		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	85.699	10.000	-	-	95.699		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693102/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



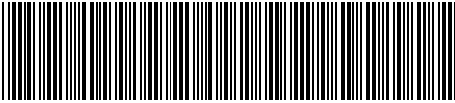
DS:1368-2132-0778-0090

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (693102) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	85.699	10.000	-	-	95.699	017@	
7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	174.375	-	-	-	174.375	12 . 00	
01 RM		-	174.375	-	-	-	174.375	017@	
7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	24.291	-	-	-	24.291	12 . 00	
01 RM		-	24.291	-	-	-	24.291	017@	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	73.983	-	-	-	73.983	12 . 00	
01 RM		-	73.983	-	-	-	73.983	017@	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	22.816	-	-	-	22.816	12 . 00	
01 RM		-	22.816	-	-	-	22.816	017@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693102/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1368-2132-0778-0090

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (693102) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
Kewenangan : (KD)

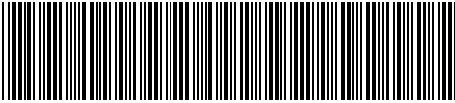
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	4.550	-	-	-	4.550	12 . 00	
01 RM		-	4.550	-	-	-	4.550	017	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	1.656.000	-	-	-	1.656.000	12 . 00	
01 RM		-	1.656.000	-	-	-	1.656.000	017@	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	245.410	-	-	-	245.410	12 . 00	
01 RM		-	245.410	-	-	-	245.410	017@	
JUMLAH		-	2.421.412	10.000	-	-	2.431.412		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693102/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1368-2132-0778-0090

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (693102) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693102	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	24.618	245.319	247.948	241.859	262.768	334.900	229.886	215.381	250.573	191.400	186.760	2.431.412
		BELANJA BARANG	0	15.997	243.940	247.948	241.859	262.768	334.900	229.886	215.381	250.573	191.400	186.760	2.421.412
		BELANJA MODAL	0	8.621	1.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
		135.11.BB.7133 Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	0	0	2.495	19.779	88.750	13.270	490	9.504	0	0	134.288
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	2.495	19.779	88.750	13.270	490	9.504	0	0	134.288
		135.11.BF.7136 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	24.618	245.319	247.948	239.364	242.989	246.150	216.616	214.891	241.069	191.400	186.760	2.297.124
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	15.997	243.940	247.948	239.364	242.989	246.150	216.616	214.891	241.069	191.400	186.760	2.287.124
		53 BELANJA MODAL	0	8.621	1.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

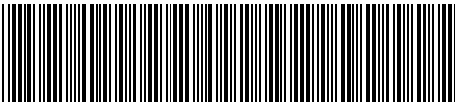
DS:1368-2132-0778-0090

Kementerian Negara/Lembaga	: [135]	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: [11]	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi	: [12]	LAMPUNG
Kode dan Nama Satker	: [693102]	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693102	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.801.452	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	52 Belanja Barang Rp. 1.801.452		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi		Efisiensi Anggaran
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.428		Efisiensi Anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.731
	Efisiensi Anggaran		Efisiensi Anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.340		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.300
	Efisiensi Anggaran		Efisiensi Anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.000	521211	Belanja Bahan(RM)
	Efisiensi Anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.868
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Anggaran
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.100
	521211 Belanja Bahan(RM)		Efisiensi Anggaran
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.988	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Efisiensi Anggaran	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.500
			Efisiensi Anggaran

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693102/2025
IV A. B L O K I R



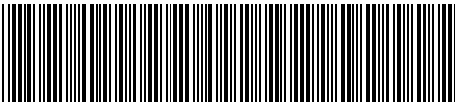
DS:1368-2132-0778-0090

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [693102] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7136.BIB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7136.BMA	Efisiensi Anggaran
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.557		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Efisiensi Anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Anggaran
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.350		Data dan Informasi Publik
	Efisiensi Anggaran		521211 Belanja Bahan(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.825
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		Efisiensi Anggaran
7136.BIC	521211 Belanja Bahan(RM)	7136.QBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.091		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Efisiensi Anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.800
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Anggaran
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Efisiensi Anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.991
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Anggaran
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.198		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200
	Efisiensi Anggaran		Efisiensi Anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 900		522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)
	Efisiensi Anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.224.086
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Anggaran
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.035		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693102/2025
IV A. B L O K I R



DS:1368-2132-0778-0090

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [693102] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

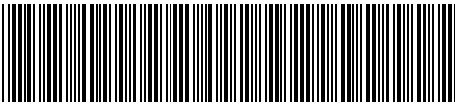
Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 182.364		
	Efisiensi Anggaran		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693102/2025
IV B. C A T A T A N



DS:1368-2132-0778-0090

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [693102] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001